



TABLOID

REFERENSI **PEMILU** 2024

nfo indonesia

MINGGU III | JULI 2023 @RP.15.000,-



*Suaramu
Untuk
Pemilu 2024*



**PEMILU DAMAI
TANPA MENJELEKKAN**

**ANGGARAN
PILKADA 2024
MASIH BELUM JELAS**

**JAGA NETRALITAS
TNI - POLRI**

**ADU KUAT
SRIKANDI
ASAL SUMSEL**

**KAMPANYEKAN GSMP
JALAN MENUJU SENAYAN**

**PENGHUNI SENAYAN ABADI
DARI SUMATERA SELATAN**

**DIKUASAI
PENDATANG BARU**

**RAHASIA
PRABOWO DAN MEGA**

**GAGASAN INTELEKTUAL
NGGAK LAKU DIJUAL**

**AHY TERUS BERHARAP
ANIES MASIH CUEK**

**JOKOWI & SURYA PALOH
HARUS JADI CONTOH
POLITIKUS**

**PEMILU MILIK
SELURUH RAKYAT**

**ADU RAYU
GERINDRA-DEMOKRAT**

**PRABOWO-GANJAR KETAT
ANIES MASIH MELOROT**

GANJAR PRANOWO :

“MAUNYA PAK JOKOWI HITAM PUTIH”



AHY TERUS BERHARAP ANIES MASIH CUEK

Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP), Anies Baswedan, batal mendeklarasikan cawapres yang akan mendampingi di Pilpres 2024 saat apel siaga perubahan Partai NasDem di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu, 16 Juli 2023.

Anies secara terus terang mengakui hingga sejauh ini belum dapat mengumumkan bakal cawapres karena adanya kriteria tambahan yang sebelumnya tidak dimasukkan dalam kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan.

Dalam acara Indonesia Rising di Grand Ballroom Hotel Kempinski Grand Indonesia Jakarta, Kamis, 20 Juli 2023, Anies menyebutkan kriteria-kriteria tersebut.

Pertama, cawapresnya bisa membantu kemenangan. Kedua, bisa membuat koalisi menjadi solid. Ketiga, bisa membantu dalam proses pemerintahan bila ditakdirkan menang.

Keempat, punya visi yang sama. “Jangan sampai visinya beda, nanti rutenya beda. Itu semua programmatic, itu semua teknokratik,” ungkap Anies.

Kelima, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu, yaitu lebih pada kepribadian. “Chemistry-nya baik. Boleh kan punya chemistry yang baik, sehingga bisa menjadi dwitunggal. Lima kriterianya itu,” ujar Anies.

Menurut Anies, semua kriteria tersebut dalam proses yang sedang berjalan. Namun, dalam proses perjalanannya ada kriteria nomor nol. “Dulu-nya saya tidak memasukkan itu, yaitu tak bermasalah dan berani. Karena kalau bermasalah sudah kesandung sekarang ini,” terang Anies.

“Nah siapa namanya, ini dia. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan itu bisa selesai, tapi sekarang lagi dibahas. Kalau yang lima kriteria kelihatannya mudah, yang nomor nol ini yang lagi dicari supaya aman, cari yang tidak bermasalah,” tutur Anies.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menilai pengumuman bakal cawapres Anies Baswedan harus dilakukan dengan taktis mengingat waktu sampai masa pencoblosan, yaitu 14 Februari 2024, tersisa tinggal tujuh bulan.

Terlepas dari nama yang belum diumumkan itu, AHY yakin Koalisi Perubahan yang saat ini beranggotakan Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS bakal semakin solid ke depannya.

“Saya yakin koalisi ke depan akan semakin solid dan kami akan semakin sinergis, termasuk juga dalam menentukan strategi di lapangan karena waktunya tinggal tujuh bulan lagi. Kita harus semakin taktis untuk menyambangi berbagai daerah di Indonesia, untuk menyapa berbagai kalangan masyarakat di Indonesia,” kata AHY.

AHY meyakini tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan siap mendukung nama bakal cawapres yang nantinya dipilih oleh Anies Baswedan. Masyarakat pun ikut menanti nama bakal cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan maju untuk di Pilpres 2024.

“Masyarakat sudah

menyambut dan menunggu kedatangan sekaligus juga rasanya ingin menyatukan energi besar, karena perubahan yang disampaikan oleh Pak Anies, Pak Capres kita, harus bersama-sama, tidak menjadi agenda orang per orang, partai per partai, tetapi ini agenda besar bersama dan berjuang bersama,” kata AHY.

AHY juga mengatakan sosok bakal cawapres pendamping Anies Baswedan harus memenuhi kriteria bisa membawa peluang kemenangan lebih tinggi pada Pilpres 2024.

“Tentu harus memenuhi sejumlah kriteria. Kriteria yang dianggap bisa membawa kans kemenangan yang lebih tinggi dalam Pemilihan Presiden 2024,” kata AHY.

Terkait sosok bakal cawapres itu, Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerahkan kepada Anies Baswedan sesuai piagam kesepakatan yang telah ditandatangani tiga partai Koalisi Perubahan. Termasuk apakah dirinya berpeluang menjadi bakal cawapres Anies, sepenuhnya akan ditentukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

AHY menuturkan seluruh parpol anggota koalisi, termasuk Partai Demokrat dipastikan bakal menghormati keputusan

Anies terkait sosok yang akan dipilih menjadi bakal

cawapres pada Pilpres 2024. Dengan catatan, keputusan itu didasarkan pada pilihan yang rasional atas dasar tujuan dan cara yang baik.

“Kita menghindari wacana-wacana yang terus menjadi liar ke sana kemari karena kita sangat menghormati pilihan itu. Tentu pilihan yang rasional atas dasar tujuan yang baik dan cara-cara yang baik. Kita ingin menunggu waktunya yang tepat, momentum yang tepat pada saatnya akan diumumkan oleh capres kita,” ujar AHY.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mendukung Anies Baswedan yang menetapkan kriteria baru untuk sosok cawapres yang tidak bermasalah dan berani. Mardani menilai kriteria itu ada pada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

“Keduanya berprestasi. Mas AHY dan Kang Aher masuk syarat,” kata Mardani, Jumat, 21 Juli 2023.

Mardani menyebut kriteria terbaru dari Anies itu harus menjadi catatan besar. Sebab, Koalisi Perubahan menginginkan perubahan yang lebih baik untuk Indonesia, sehingga capres dan cawapres tidak dibebani masa lalu.

“Tidak ada peluang dikriminalisasi. Dan itu jadi dasar yang kuat untuk membangun Indonesia yang bersih dan berani memberantas korupsi,” ujarnya.

Sementara itu, Deputy Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai AHY sangat memadai dan memenuhi kriteria 0 yang disebut Anies Baswedan, yakni tidak punya risiko hukum dan berani.

Kamhar menyebut partainya menghormati kriteria baru oleh Anies tersebut.

Kriteria 0, kata dia, berarti tidak punya beban masa lalu, tak bermasalah, dan punya keberanian. Hal itu disebut sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan cawapres saat ini.

“Mas Ketum AHY sangat memadai dan memenuhi kriteria ini,” kata Kamhar dalam keterangannya, Jumat, 21 Juli 2023. ●





“Saya pikir ini sebuah penegasan dari Mas Ganjar, ‘Pak Jokowi ada di belakang saya’”

Yunarto Wijaya

GANJAR PRANOWO: MAUNYA PAK JOKOWI HITAM PUTIH

Bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, memperkenalkan baju identitas kampanyenya yakni kemeja garis-garis hitam-putih yang diklaim dirancang oleh Presiden Joko Widodo.

Gubernur Jawa Tengah itu menceritakan kemeja gari-garis hitam putih dalam acara Silaturahmi 1 Muharam 1445H Bersama para relawan di Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Juli 2023.

Ganjar menjelaskan saat masih berbicara di panggung depan relawan, suatu ketika dia bertemu Presiden Jokowi. Kemudian, Presiden Jokowi memberikan kertas yang isinya desain kemeja garis-garis hitam-putih.

“Sampai pada akhirnya beliau (Jokowi) menyampaikan selebar kertas kepada saya, ‘Pak Ganjar, mungkin ini bagus.’” ungkap Ganjar.

“Saya lihat, saya bolak, saya balik, dan yang bagus itu adalah baju yang saya pakai ini. Bahkan, beliau pun sangat perhatian sampai detail baju sehingga merekomendasikan untuk saya pakai,” tuturnya sambil tersenyum.

Di acara tersebut, Ganjar dan para relawan mengenakan dalam waktu bersamaan kemeja gari-garis hitam putih itu. Dia menekankan pentingnya identitas yang pasti. Hitam atau putih.

“Kenapa hitam-putih? Saya sampaikan bahwa saya bukan orang abu-abu. Ketika kita bersikap pada suatu keputusan yang sulit, Anda mau pilih yang mana? Hitam atau putih,” tegas Ganjar di panggung.

Ketua Deklarasi Nasional Relawan Jokowi-Ganjar, Teddy Wibisana, memberikan soal baju garis-garis hitam putih yang dikenakan Ganjar untuk para relawan dalam menghadapi Pemilu 2024.

“Dalam konteks hitam dan putih sikap ini adalah sikapnya dalam kita mendukung Ganjar Pranowo,” ujar Teddy.

Menurutnya, semua memperebutkan pengaruh Presiden Jokowi dalam dukungan terhadap Pilpres 2024. Hal itu juga terjadi pada para relawan, sehingga banyak di antara relawan yang masih menunggu instruksi atau garis lurus pada perintah.

“Namun, kami ingin hitam putih sajalah bahwa kami sepakat untuk mendukung Ganjar Pranowo dengan segala perjuangan dan tentu juga seperti Pak Ganjar katakan, ada kemungkinan juga kita ditinggal teman-teman,” ungkapnya.

Teddy menambahkan, pihaknya tak mempersoalkan dengan kemungkinan sejumlah relawan yang meninggalkan Ganjar. Pasaunya, sikap mereka sudah selesai. Artinya, pihaknya secara militan mendukung



Ganjar dalam konteks hitam dan putih.

“Kenapa garis lurus, ya kita garis lurus pada nilai-nilai perjuangan kita, karena kita lihat Pak Ganjar cocok dengan nilai-nilai perjuangan kita, yaitu menjaga NKRI, Pancasila, UUD 45. Ini yang menjadi semangat dan simbol dari baju hitam putih garis lurus,” terangnya.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menuturkan, apa yang disampaikan Ganjar soal kemeja garis-garis hitam putih memberi gambaran bahwa Presiden Jokowi memberikan dukungan penuh kepada Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.

Yunarto mengatakan, Ganjar seolah sudah mulai merasa harus bercerita soal kedekatannya dengan Presiden Jokowi, meski semula terlihat tidak ingin. Lewat cerita Ganjar, Presiden Jokowi terbukti sampai memikirkan teknis kampanyenya. Lewat baju kampanye, Presiden Jokowi membuat Ganjar milik semua pihak.

Yunarto menegaskan, label petugas partai bukan hanya dimiliki Ganjar, namun semua capres. Dia pun bicara adanya gerakan untuk menarasikan Ganjar sebagai petugas partai. Padahal, dulu Ganjar sempat dinarasikan rebel lantaran kerap berkonflik dengan internal PDIP sebelum menjadi capres.

“Itu yang menjadi tantangan Mas Ganjar. Loyalitas partai kemudian tidak menarasikan loyalitas dia ketika terpilih,” kata Yunarto,

Kamis, 20 Juli 2023.

Lebih dari itu, Yunarto menegaskan kembali langkah Jokowi ikut mengurus teknis kampanye Ganjar membuktikan bawah mantan Wali Kota Solo itu memberi dukungan penuh kepada orang nomor satu di Jateng itu.

“Saya pikir ini sebuah penegasan dari Mas Ganjar, ‘Pak Jokowi ada di belakang saya,’” ujarnya.

Sementara itu, peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidi-

man Ahmad, menyebut, penggunaan kemeja itu sebagai pembuktian diri Ganjar bahwa dia bukan hanya milik partai politik, dalam hal ini PDIP.

“Ya (bukan hanya milik partai), mau tidak mau Ganjar harus menjadi milik semua. Satu partai tidak akan cukup menjadikan dia presiden,” ujar Saidiman.

Menurut dia, kemeja yang dipakai Ganjar itu bermotif lurik-lurik yang mengingatkan akan baju khas Jawa, khususnya Yogyakarta.

“Namun dengan warna hitam dan putih, mungkin ini ingin memberi kesan dekat dengan lokalitas (masyarakat tradisional), namun pada saat yang sama lebih terbuka,” kata dia.

Di sisi lain, Saidiman mengakui simbol PDIP tidak ditinggalkan sama sekali dalam baju tersebut. Karena warna hitam dan putih juga cukup menonjol dalam lambang atau bendera PDIP. Namun, yang paling menarik dari kemeja itu ialah didesain langsung oleh Presiden Jokowi.

“Ini bisa dimaknai bahwa Ganjar memang tokoh yang secara politik paling dekat dengan Jokowi, bahkan mungkin tokoh yang dipersiapkan melanjutkan pemerintahan selanjutnya,” ujar dia.

Meski banyak mendapatkan dukungan, apa yang dilakukan Ganjar juga menuai kritikan dari Deputy Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Dia menyebut langkah Ganjar yang memamerkan baju hasil arahan Presiden Jokowi bisa memunculkan pertanyaan publik.

“Wajar saja jika kemudian ada pertanyaan-pertanyaan kritis, apa yang sebenarnya orisinal dari Pak Ganjar?” kata Kamhar, Kamis, 20 Juli 2023.

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu mengatakan, langkah Ganjar yang memamerkan baju kampanye memunculkan kesan Gubernur Jawa Tengah itu mirip Jokowi.

“Ada kesan menjadi Capres berarti menjadi serba Jokowi atau menjadi Jokowi,” ujar Kamhar.

Kamhar mempersilakan Ganjar yang memperkenalkan baju kampanye sebagai bagian gimik politik agar memperoleh suara dari pendukung Jokowi. Namun, dia mengingatkan soal baju kampanye sebenarnya menjadi satu di antara atribut penting dalam kontestasi pemilu. Sebab, desain dari baju kampanye mewakili gagasan, konsep, atau karakter dari seorang calon pemimpin.

“Biasanya ini mewakili gagasan, konsep atau karakter tertentu, meskipun ada juga yang sekadar untuk gagah-gagahan sebagai pembeda dibanding yang lainnya,” kata Kamhar.●



“Seperti Ganjar Pranowo. Kita diidentitaskan sebagai tokoh nasionalis yang sok akrab dengan sana-sini dan lebih mengandalkan pencitraan”

Bagindo Togar



GAGASAN INTELEKTUAL ENGGAK LAKU DIJUAL

Pintar saja tidak cukup. Punya uang saja juga tidak cukup. Pintar dan punya uang memang salah satu modal penting dalam penentuan sukses tidaknya kandidat calon presiden di Pilpres 2024 meski bukan yang utama.

Tiga kandidat calon presiden yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan punya strategi masing-masing di Pilpres 2024.

Ada tiga karakter berbeda yang dihadirkan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan di Pilpres 2024 hingga membuat strategi mereka juga tidak sama. Namun, ketiganya juga punya kemiripan dalam melakukan sosialisasi.

Di Pilpres 2024 ini, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo menerapkan strategi yang hampir sama dengan mengadopsi cara Jokowi. Sedangkan, cara Anies Baswedan berbeda yakni lebih menonjolkan sosok intelektualitasnya sehingga terkesan eksklusif.

Bukan berarti jualan gagasan intelektual, lulusan luar negeri, anak pahlawan tidak penting di Pilpres 2024. Nyatanya, dari berbagai hasil survei belum bisa menempatkan elektabilitas Anies Baswedan di posisi pertama atau kedua.

Hasil kajian Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI), Anies Baswedan masih berada di urutan ketiga, kalah dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Cara sosialisasi Anies Baswedan selama ini yang banyak menjual konsep intelektual di Pilpres 2024 belum mendongkrak elektabilitasnya.

Bahkan bukan tidak mungkin, bila tidak melakukan perubahan gerakan sosialisasi ke masyarakat di Pilpres 2024, Anies Bas-

wedan yang dijagokan Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS ini tidak akan masuk dalam putaran kedua.

“Di Pilpres 2024 ini saya yakin Prabowo Subianto akan melakukan pola gerakan yang berbeda pada pertarungan pilpres periode kemarin,” terang Direktur Eksekutif LKPI, Arianto.

Sementara pola gerakan Ganjar Pranowo sekarang sangat mirip dengan Jokowi dan pola gerakan ini sangat diapresiasi masyarakat di Pilpres 2024.



Arianto mengingatkan, syarat pertama masyarakat Indonesia dalam memilih adalah ingin kenal dahulu dengan capresnya dari hati ke hati. Kemudian akan timbul rasa suka di hati masyarakat dan akhirnya akan memilihnya.

Bukan capres tersebut langsung menjual gagasan intelektual yang tinggi di masyarakat pada Pilpres 2024. Pikiran masyarakat untuk menjatuhkan pilihannya kepada capres di Pilpres 2024 tidak terlalu tinggi-tinggi. Cukup apa yang dilakukan capres merupakan cerminan pada diri masyarakat setiap hari saja.

“Pola gerakan ini sudah terbukti dilaku-

kan oleh Jokowi pada pilpres periode kemarin,” terang Arianto.

Untuk itu, Anies Baswedan perlu mengubah pola gerakan sosialisasi ke masyarakat di Pilpres 2024. Dia harus turun ke pasar menyapa pedagang, masyarakat yang sedang berbelanja, menemui para nelayan, petani yang sedang panen, orang-orang yang bekerja di gorong-gorong dan lain sebagainya.

Menurut Arianto, pergerakan Anies Baswedan yang selama ini dilakukan harus di-

banyak menjual gagasan untuk mendapatkan insentif elektoral yang lebih banyak dibandingkan Prabowo Subianto.

“Anies Baswedan secepat mungkin harus mengubah gerakan sosialisasi ke masyarakat dengan cara berbeda di Pilpres 2024. Cermin jelas sudah dibuktikan dengan kekalahan Prabowo Subianto pada Pilpres periode kemarin dengan lawannya Jokowi,” ujarnya.

Sementara pengamat politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes), Bagindo Togar, menilai, ketiga kandidat calon presiden ini sama-sama berada dalam satu puzzle game politik. Perasaan mereka juga sama yakni masih bingung harus melakukan apa.

Mereka dinilai merasa panik melihat pergerakan calon yang lain dan masih ekstra hati-hati menentukan langkah politik selanjutnya, serta sama-sama masih menunggu pergerakan selanjutnya.

Namun, secara personal, ketiganya juga punya identitas politik yang berbeda. Perbedaan ini juga harus dipertahankan sebagai bentuk identitas mereka sesungguhnya.

“Seperti Ganjar Pranowo. Kita diidentitaskan sebagai tokoh nasionalis yang sok akrab dengan sana-sini dan lebih mengandalkan pencitraan,” ungkap Togar.

Anies Baswedan lebih dikenal sebagai sosok atau simbol politik identitas. Nuansa politik identitas sangat melekat pada diri Anies Baswedan. Sehingga hal ini juga yang menjadi salah satu keunggulan dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

“Sejak menjabat Gubernur DKI, Anies sudah dikenal sebagai simbol politik identitas. Jangan dikurangi hal-hal yang sudah melekat ini, bahkan justru ditambah. Kalau dikurangi malah akan bahaya dan merugikan Anies sendiri,” urainya.

Sementara, sosok Prabowo disimbolkan sebagai orang yang paling sering muncul di pemilihan presiden dan paling sering gagal. Pada Pilpres 2024, Prabowo Subianto sangat populer dan telah mengubah gaya-gaya lamanya dan terasa lebih humble.●

rem demi untuk meningkatkan elektabilitas di Pilpres 2024.

Melihat ke belakang pada pertarungan Jokowi dan Prabowo Subianto pada 2019, tentunya menjadi cermin utama bagi Anies Baswedan.

Prabowo Subianto yang dulunya banyak menampilkan intelektual seperti pendidikan, bahasa Inggris, hingga anak begawan ekonomi justru tidak banyak mempengaruhi peningkatan elektoral. Justru Jokowi yang pada pemilihan presiden kemarin hanya menampilkan kesederhanaan.

Jokowi sering turun ke lapisan masyarakat menengah ke bawah tanpa



“Dengan satu klik, para caleg bisa mendapatkan wilayah sasaran target suaranya”

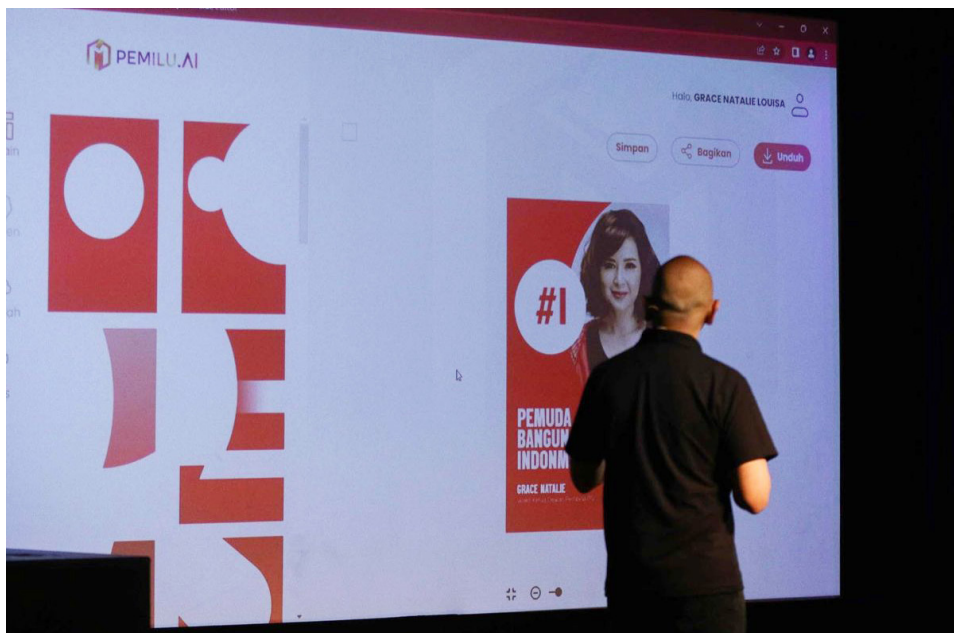
Yose Rizal

INFO
PILEG

Minggu III • Juli 2023

5

PETAKAN CALON PEMILIH PAKAI PEMILU.AI



Seiring berkembangnya zaman dan semakin majunya teknologi informasi, muncul platform untuk membantu para bakal calon legislatif (caleg) memetakan pemilih dan target suara di Pemilu 2024.

Platform itu bernama Pemilu.AI yang merupakan platform yang memanfaatkan teknologi generative artificial intelligence (AI) dan big data.

Pemilu.AI berperan sebagai konsultan politik, menampilkan data yang telah di-

olah sebagai gambaran bagi caleg yang ingin melakukan kampanye di suatu daerah pemilihan (dapil).

“Dengan teknologi generative AI mengkombinasi data-data caleg dikombinasikan dengan konstituen di dapilnya, dari data demografi, data politik, data sosial ekonomi, data media online, data sosial media, data harga bahan pokok dan sebagainya untuk menghasilkan kampanye yang microtargeting dan personal buat tiap caleg,” kata Founders Pemilu.AI, Yose Rizal, di Jakarta Theater, Jakarta, Kamis, 20 Juli 2023.

Yose menjelaskan, platform Pemilu.AI akan memberikan informasi yang komprehensif, mulai dari sebaran target suara pemilih di dapil untuk tingkat perwakilan DPR RI, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota, termasuk memberikan rekomendasi komunikasi kepada rakyat.

“Pemilu.AI berkomitmen memberikan solusi-solusi bagi permasalahan caleg tadi. Kami berkomitmen untuk menghadirkan untuk memudahkan mereka lebih mudah memahami konstituen pemilih di dapilnya,” jelas Yose.

“Dengan satu klik, para caleg bisa mendapatkan wilayah sasaran target suaranya. Dengan satu klik bisa mendapat strateginya. Dengan satu klik bisa mendapatkan rekomendasi komunikasinya,” sambungnya.

Sementara, CEO Pemilu.AI, Luky Djani, menyebut, aplikasi ini diharapkan bisa memberi kesempatan yang sama bagi calon perwakilan rakyat, khususnya dalam mengupayakan terwujudnya aspirasi masyarakat lewat pemilu yang berintegritas dan setara.

“Guna mendukung pemilu yang berintegritas, Pemilu.AI menawarkan berbagai

tools dan fitur berbasis teknologi generatif AI yang bisa memberikan strategi kampanye berdasarkan persona caleg, kampanye microtargeting tepat sasaran, hingga strategi komunikasi kampanye pada konstituen,” kata Luky.

Selain itu, Pemilu.AI memiliki fitur “Tim Sukses” untuk membantu memonitor kegiatan dan mengukur efektivitas tim sukses dalam melakukan canvassing, penggalangan dukungan, dan kegiatan kampanye.

“Dari sisi komunikasi kampanye, Pemilu.AI dapat merancang komunikasi kampanye mulai dari slogan, narasi pidato, caption media sosial, target sasaran iklan, dan desain APK, hingga dapat menyediakan aplikasi monitoring times, yang dirancang untuk membantu calon legislatif meningkatkan peluang memenangkan pemilihan dalam kampanye mereka,” pungkasnya. ●

Jangan Berebut Lumbung yang Sama

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikh, memberikan wejangan kepada segenap kader untuk bekerja bersama memenangkan kontestasi Pemilu 2024 saat menghadiri konsolidasi partai di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Anggota DPR asal daerah pemilihan VII Jawa Barat itu meminta para calon legislatif (caleg) bekerja dengan skema kolaborasi dan sinergi bersama dalam memenangkan hati masyarakat di ajang pesta demokrasi lima tahunan itu.

“Kalau kita tanggung sendiri tentu akan terasa berat, tapi kalau kita sharing bersama-sama tantangan-tantangan itu, maka Insya Allah bisa menjadi lebih ringan,” katanya di Cikarang, Rabu, 19 Juli 2023.

Syaikh menginstruksikan segenap caleg tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota mampu mengoptimalkan konsep sinergi satu sama lain, baik secara vertikal maupun horizontal agar kemenangan di pemilihan legislatif (Pi-



leg) bisa terwujud.

Mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini mencontohkan pengalaman pahit PKS saat Pileg 2019 di Jawa Timur. Saat itu, menurut dia, perolehan suara di kota dan kabupaten se-Jawa Timur adalah 1,2 juta. Namun, begitu ke provinsi turun jadi satu juta dan ketika ke pusat hanya 800 ribu suara.

“Setelah diteliti rupanya alat-alat APK yang dibawa tidak sekuat yang di DPR RI dan ketika sampai akhir masa kampanye selesai APK yang sudah disiapkan oleh anggota-anggota caleg DPR RI ternyata masih menumpuk di rumah calon-calon kota dan kabupaten. Jadi tidak linear seperti itu,” ucapnya.

Syaikh juga meminta agar para caleg

mengembangkan kolaborasi horizontal dengan tidak saling rebut suara di satu lumbung yang sama.

“Misal kalau sudah masuk di kalangan buruh itu adalah Pak Sidharta, saya coba tidak perlu masuk lagi ke sana ya kecuali kalau memang ada elemen-elemen buruh atau tempat tinggalnya yang tidak bisa disentuh oleh beliau. Nah, itu yang kemudian kita mendatangi. Agar apa? Suara kita, jadi masyarakat tidak bingung mau pilih caleg PKS yang mana,” ucapnya.

Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustofa, menjelaskan jika kegiatan konsolidasi ini bertujuan untuk silaturahmi, mempertemukan para calon legislatif DPR RI, provinsi dan kota maupun kabupaten.

“Ada juga caleg yang belum bertemu dengan caleg lain, mereka kenal dan tandem Bersama, sehingga wilayahnya lebih kenal lagi, jadi harus tandem bareng-bareng,” katanya. ●



ADU RAYU GERINDRA-DEMOKRAT

Dinamika politik di Tanah Air menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semakin cair. Elite partai politik makin rajin melakukan pertemuan, meski masing-masing sudah membentuk koalisi.

Pada 20 Juli 2023, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, melakukan pertemuan dengan Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat.

Muzani yang tiba di kantor DPP Partai Demokrat pukul 13.55 WIB tampak didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade, dan beberapa elite partai lainnya.

Sementara, Riefky yang menyambut rombongan Partai Gerindra bersama Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon, serta sejumlah elite Demokrat yang lain.

Keduanya tidak membeberkan topik apa yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Riefky dan Muzani hanya mengatakan bahwa pertemuan mereka adalah momen bahagia.

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan, pertemuan Muzani dan Riefky merupakan silaturahmi kebangsaan antarkedua belah pihak. Selain itu, pertemuan itu akan membahas isu-isu kebangsaan dan kerakyatan terkini.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, mengatakan silaturahmi yang dilakukan Ahmad Muzani untuk membahas sejumlah isu soal kebangsaan hingga Pemilu dan Pilpres 2024.

“Banyak hal yang tadi bicarakan. Tentu tidak hanya membicarakan Pemilu 2024, tetapi jauh lebih besar, berbagai isu-isu kebangsaan yang hari ini mungkin sedang terjadi di negeri kita ini, termasuk juga isu-isu yang ada di DPR RI,” kata Riefky.

Terkait Pilpres 2024, Partai Demokrat dan Partai Gerindra saling menjaga etika politik. Dia mengatakan Partai Demokrat memahami bahwa Partai Gerindra berada di koalisi berbeda, yakni Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara, Partai Demokrat saat ini berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai NasDem dan PKS.

“Tentu banyak hal yang kami bicarakan terkait pilpres ini, termasuk juga keinginan kami agar pemilu juga pilpres berjalan dengan baik, damai, demokratis,” kata Riefky.

Dia pun menjelaskan silaturahmi kebangsaan tersebut melanjutkan pertemuan-pertemuan yang sebelumnya sudah dilakukan elite Partai Demokrat dan Partai Gerindra.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo



Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan, Jawa Timur, pada Mei 2023. Kemudian, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, Juni 2023.

“Hari ini, silaturahmi kebangsaan yang kami lakukan sebetulnya melanjutkan pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan, baik oleh Ketua Umum AHY dan Pak SBY,” ucapnya.

Riefky menambahkan komunikasi antara kedua partai itu perlu terus dijaga ka-

bermaksud menggoda keputusan politik Partai Demokrat terkait Pilpres 2024.

Muzani menjelaskan, pihaknya memahami Partai Demokrat telah memiliki keputusan politiknya sendiri, yakni mengukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) bersama Koalisi Perubahan. Demikian juga Partai Demokrat mengetahui Partai Gerindra telah mengambil keputusan final tentang calon presiden, yakni Prabowo Subianto dan telah berkoalisi dengan PKB.

Terkait komunikasi antara Gerindra dan

yang kita komunikasikan,” ucapnya.

Muzani tidak menampik bahwa pertemuan tersebut juga membahas terkait calon wakil presiden (cawapres). Namun, Gerindra dan Demokrat sepakat pada pilihan politik masing-masing.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut pertemuan Teuku Riefky Harsya dengan Ahmad Muzani sudah lama diniatkan, namun baru terealisasi.

AHY menganggap setiap pertemuan antarpolitik memiliki semangat yang baik untuk menjalin komunikasi sekaligus dapat menjadi sarana mencari solusi berbagai persoalan di negeri ini. Dia mengaku termasuk para kader partai berlambang mercy itu selalu membuka diri untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi segala arah dengan partai manapun.

“Yang jelas kami ingin menjadi contoh buat masyarakat luas bahwa walaupun berbeda dalam pilihan dan posisi politik selalu terbuka ruang untuk bisa berkomunikasi dan membangun kerja sama,” kata dia.

Terkait peluang terbentuknya koalisi baru menyusul pertemuan petinggi dua partai itu, AHY mengakui bahwa dalam politik kemungkinan itu selalu ada.

“Saya pikir hal-hal tersebut selalu menjadi bahan untuk diskusi ya. Kami tidak ingin berandai-andai, tetapi yang jelas politik itu memang serba mungkin. Politik adalah seni yang bisa menyatakan semua itu bisa terjadi,” kata dia.

Kendati demikian, AHY memastikan bahwa hingga saat ini Partai Demokrat tetap serius untuk membangun Koalisi Perubahan.

“Saya yakinkan bahwa hari ini demokrat juga tetap serius untuk membangun koalisi perubahan. Nah, tentu dalam perjalanannya kita ingin membuka diri siapa pun bisa bergabung dalam semangat perubahan seperti ini, begitu pula sebaliknya,” kata dia. ●



rena perlu banyak partai politik di Indonesia untuk mengurus bangsa dan menjaga proses demokrasi.

“Kami ingin stabilitas politik nasional harus diupayakan kondusif. Stabilitas politik nasional tentu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya, tidak hanya dalam menjelang, tetapi saat dan pasca-pemilu,” jelasnya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan, kedatangannya ke kantor DPP Partai Demokrat, tidak

Demokrat, Muzani mengatakan hal itu merupakan upaya untuk saling bersilaturahmi dan bergandengan tangan. Sebab, dia menilai diperlukan kekuatan politik yang banyak untuk membangun Indonesia.

“Membangun Indonesia dengan jumlah 275 juta penduduk, dengan masalah yang segudang, dengan problem yang ruwet, ribet, rumit, tentu saja memerlukan kekuatan partai politik yang banyak. Memerlukan kekuatan-kekuatan yang banyak itulah



“Saya kira ini bukan kapan bertemu dan tidak bertemu, keinginan Prabowo ke Megawati seperti ada sesuatu yang terjadi, sebenarnya PDIP dan Gerindra, Prabowo dan Megawati enggak ada soal”

Adi Prayitno

RAHASIA PRABOWO DAN MEGA

Pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sedang dijadwalkan. PDIP terbuka untuk bekerja sama dengan partai mana pun.

Bagi Gerindra, pertemuan ini ingin menunjukkan kedua partai memiliki kesamaan membangun Indonesia meski setiap partai sudah memiliki bakal calon presidennya sendiri.

Pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri bakal menunjukkan hal yang positif bagi publik, khususnya menjelang Pemilu 2024.

Prabowo pun mengaku siap bertemu dengan Megawati Soekarnoputri. Hal itu disampaikan Prabowo seusai menerima politisi PDIP, Budiman Sudjatmiko, di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juli 2023.

“Saya siap bertemu siapa pun, apalagi Bu Mega. Bagus kan kalo semua pemimpin saling bertemu,” kata Prabowo.

Namun, Prabowo belum membeberkan kapan pertemuannya dengan Megawati itu bakal digelar.

Wacana pertemuan antara Prabowo dan Megawati memang sempat mengemuka setelah pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, yang menyebut hanya tinggal menunggu waktu yang tepat.

“Kita paham juga karena kesibukan masing-masing belum ketemu waktu yang tepat, tetapi kita harap dalam waktu dekat akan terjadi pertemuan,” ujar Budi.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, Prabowo Subianto sangat siap untuk bertemu dengan Megawati Soekarnoputri. Dirinya pun berharap rencana pertemuan tersebut dapat segera terlaksana.

“Lebih cepat lebih baik,” kata Habiburokhman, Rabu, 19 Juli 2023.

Meskipun berharap pertemuan dapat segera terlaksana, Habiburokhman mengaku tak memiliki target pasti mengenai tanggal pertemuan. “Kita enggak patok tanggal,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan, sudah cukup lama Prabowo menyampaikan keinginan untuk bertemu dengan Megawati. Namun, pertemuan belum bisa dilakukan karena kesibukan Megawati.

“Posisinya masih menunggu karena sudah cukup lama Pak Prabowo menyampaikan pesan ini kepada sejumlah pimpinan PDI-P. Dan kami merasa karena kesibukan ibu Mega yang luar biasa,” kata Muzani, Jumat, 14 Juli 2023.

Muzani mengungkapkan, Prabowo tetap ingin menjalin silaturahmi dengan Megawati. Meskipun, kedua figur tersebut memiliki perbedaan pilihan politik jelang Pilpres 2024. Keinginan Prabowo itu dilandasi dengan semangat kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan.

Dalam pandangan Muzani, saat ini berbagai partai politik enggan memberikan jarak satu sama lain karena merasa Indonesia butuh diurus bersama. Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengungkapkan pertemuan antara Megawati dan Prabowo akan segera terjadi. Rencana pertemuan tersebut akan digelar dalam waktu dekat.

Puan mengatakan jadwal pertemuan kedua tokoh tersebut masih dibahas karena memang dinantikan oleh publik dan tokoh politik. Pasalnya, baik PDIP dan Gerindra telah memiliki koalisi

masing-masing, di mana masing-masing koalisi mengusung nama Capres yang berbeda.

PDIP berkoalisi dengan PPP, Perindo dan Hanura mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Sedangkan, Gerindra berkoalisi dengan PKB mendukung Prabowo Subianto sebagai capres.

Dirinya berharap pertemuan antara Megawati dan Prabowo dapat segera digelar. Meskipun putri dari Megawati Soekarnoputri ini mengaku belum dapat menyampaikan tanggal pasti pertemuan tersebut.

Lebih jauh, Puan juga belum bisa menyampaikan topik yang akan dibahas oleh Prabowo dan Megawati dalam pertemuan itu.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, ada sesuatu di balik rencana pertemuan Prabowo dan Megawati.

“Saya kira ini bukan kapan bertemu dan tidak bertemu, keinginan Prabowo ke Megawati seperti ada sesuatu yang terjadi, sebenarnya PDIP dan Gerindra, Prabowo dan Megawati enggak ada soal,” ungkap Adi Prayitno.

Adi menyebut, Prabowo ingin bersilaturahmi dengan Megawati agar mencairkan suasana. Apalagi, sebelumnya PDIP sudah berkomunikasi dan mengajak bicara PAN, Partai Demokrat, dan partai lainnya,

namun belum dengan Partai Gerindra.

“Kelihatan PDIP sedang membuka komunikasi politik dengan semua partai politik, PKB iya, Demokrat iya, PAN iya, Golkar iya. Tapi kok rasa-rasanya Gerindra belum diajak bicara. Kan itu sebenarnya

Prabowo ingin menyatakan keinginan. Di acara Puncak Bulan Bung Karno di GBK tak ada perwakilan Gerindra, alih alih Prabowo Subianto elit Gerindra juga tak ada,” ungkapnya.

Adi mengatakan, saat ini tensi sedang naik jelang Pilpres 2024 dan ingin mencairkannya. “Prabowo ingin ketemu Megawati hanya sebatas komunikasi politik biasa, mencairkan suasana yang saat ini agak sedikit naik tensinya gara-gara Pilpres 2024,” sambungnya.

Selain itu, kata Adi, kemungkinan ada pendekatan Partai Gerindra bersatu dengan PDIP. “Politik kita selalu gampang ganti musim, sekarang teman besok lawan, sangat mungkin kembali antara PDIP dengan Gerindra,” ungkapnya.

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, menanggapi soal keinginan Prabowo untuk bertemu Megawati. Menurutnya, jika dilihat dari konteksnya, pertemuan yang diinginkan Prabowo dengan Megawati adalah pertemuan pribadi. Artinya, ada hal penting yang ingin dibicarakan.

“Kalau kita gradasi konteks komunikasi, ada komunikasi massa, komunikasi organisasi, komunikasi kelompok dan komunikasi antarpribadi. Kalau ini ingin bertemu berarti antarpribadi. Kalau antarpribadi ada yang complicated, rahasia, penting. Kalau kurang penting dan sederhana, komunikasi massa,” kata Emrus.

Emrus mengatakan, semakin rahasia sifatnya, maka pertemuannya akan semakin pribadi. Hal tersebut dikarenakan hal yang ingin dibicarakan tidak secara gamblang dijelaskan ke publik.

“Karena pesan yang disampaikan tidak bisa ke publik dan hanya ke Bu Mega bisa didiskusikan. Karena keinginan pertemuan dengan Megawati komunikasi pribadi, berarti ada sesuatu yang diperbincangkan,” ujarnya.



“Pak Jokowi juga tanya, ‘siapa ini wakil presidennya ini’, saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu Pak Anies itu”

Surya Paloh



JOKOWI DAN SURYA PALOH HARUS JADI CONTOH

Presiden Joko Widodo akhirnya kembali bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di Istana Kepresidenan, Jakarta, 18 Juli 2023. Sebelumnya, relasi Presiden Jokowi dan Surya Paloh merenggang usai Partai Nasdem memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Surya Paloh bercerita kehadirannya ke Istana Negara usai pelantikan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atas undangan Presiden Jokowi. Surya menyebut pertemuan itu membuka kembali komunikasi dirinya dan Jokowi setelah beberapa lama tidak bertemu.

“Mungkin kemarin dianggap hari baik oleh Pak Jokowi selesai reshuffle kabinet untuk mengundang saya bertemu dan berbicara,” ujar Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem.

Surya bercerita dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu ia dan Jokowi berbicara mengenai berbagai topik.

Pada pertemuan itu, Jokowi juga menyinggung pelaksanaan Apel Siaga Perubahan yang dilakukan Partai Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno, Minggu, 16 Juli 2023. Pujian itu menjadi pertanda hubungannya dengan mantan Wali Kota Solo itu baik-baik saja.

Selain memuji acara yang digelar partainya, Jokowi juga memberi ucapan selamat ulang tahun pada Surya Paloh yang ke-72 pada 16 Juli. Ia menyebut suasana pertemuan berjalan dengan santai dan penuh kekeluargaan.

Paloh mengatakan suasana cair dan harmonis yang tersirat dalam pertemuannya dengan Jokowi diperlukan jelang kontestasi Pemilu 2024. Apalagi, Surya dan Jokowi berkemungkinan tidak akan berada di satu kubu.

Hal lain yang disinggung Jokowi adalah pernyataannya yang mengkritik soal revolusi mental. Menurut Surya, Jokowi menanggapi santai kritikan yang ia sampaikan soal belum berjalannya revolusi mental dengan maksimal dalam apel siaga Nasdem.

Presiden Jokowi juga disebut menanyakan perihal siapa bakal cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. “Pak Jokowi juga tanya, ‘siapa ini wakil presidennya ini’, ‘saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu Pak Anies itu,’” kata Surya.

, menyebut pertemuan yang berlangsung satu jam tersebut memperkuat eksistensi dalam sistem demokrasi. Per-



temuan keduanya juga memperlihatkan kedewasaan dalam berpolitik.

“Pertemuan dua negarawan ini sebenarnya yang paling penting pendidikan politik untuk anak-anak muda, bahwa apapun pilihannya, silaturahmi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara harus tetap dijalin,” ujar Hermawi.

Hermawi menambahkan, Presiden Jokowi dan Surya Paloh sepakat agar kontestasi Pemilu 2023 berjalan dengan kondusif. Kedu-

anya tetap menjaga kehidupan berbangsa dan menjaga kedamaian bernegara.

Sementara itu, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai pertemuan keduanya adalah hal yang luar biasa. Apalagi, pertemuan itu dilakukan di hari yang sama setelah Presiden Jokowi mengganti menteri

dari Nasdem.

“Saya kira ini pertemuan yang cukup luar biasa, di tengah hubungan keduanya yang memanas, mendidih, pada titik kombinasi yang sulit disatukan, tapi Jokowi dan Surya Paloh bisa bertemu,” kata Adi Prayitno.

Adi mengapresiasi Surya Paloh yang tetap tegak lurus mendukung Presiden Jokowi meski jalan politiknya berbeda. Apalagi, kini kursi Menkominfo yang sebelumnya diisi oleh Johnny G Plate, tak lagi diberikan ke kader Nas-

Dem. “Saya kira luar biasa. Luar biasa dari segi Surya Paloh terutama. Karena kalau mau jujur, Surya Paloh ini adalah ket-

ua umum partai yang saya kira cukup loyal, tegak lurus, memberikan dukungan politiknya secara total kepada Jokowi, khususnya sejak 2014. Meski belakangan hubungan keduanya itu retak gara-gara Surya Paloh mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat capres,” ujarnya.

“Apalagi misalnya kursi NasDem hilang satu, Menkominfo misalnya. Dan pada saat yang bersamaan, Surya Paloh masih bertemu dengan Jokowi. Ini tentu suasana kebatinan yang saya kira di atas rata-rata dan tidak dimiliki oleh semua orang,” sambungnya.

Adi memandang Presiden Jokowi memang tak terlihat ‘happy’ saat NasDem menyatakan dukungan capresnya kepada Anies Baswedan. Dia bahkan mewajarkan jika NasDem kini sudah tidak dianggap di partai koalisi pemerintahan.

“Karena NasDem dianggap tidak memiliki tarikan nafas politik yang sama dengan Jokowi. Dari situlah hubungan NasDem dan Surya Paloh tidak membaik. Bahkan, NasDem harus diakui sudah mulai dianggap anak tiri, sudah tidak dianggap teman koalisi, karena dalam beberapa pertemuan ketum koalisi pemerintah, ya Surya Paloh tidak diundang,” katanya.

Terkait pertemuan keduanya, ada kemungkinan Presiden Jokowi dan Paloh berbicara soal Pemilu 2024. Ada juga kemungkinan soal kursi Menkominfo yang kini tak lagi jatuh ke kader NasDem. Di sisi lain, Adi menilai pertemuan keduanya harus bisa dicontoh oleh petinggi parpol lainnya.

“Terlepas dari pembicaraan-pembicaraan itu, antara Jokowi dan Surya Paloh ini menjelaskan sekeras apapun sikap politik mereka itu saling berbeda, sekeras apapun persaingan politik, tapi komunikasi dan pertemuan terus dilakukan keduanya, ini harus jadi contoh,” ujarnya. ●





“Tapi, kita ingin dan kita berharap tidak terlalu banyak perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi”

Mahfud MD

PEMILU MILIK SELURUH RAKYAT

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan, salah satu alasan digelarnya pemilihan umum adalah untuk terjadinya sirkulasi kepemimpinan.

Menurutnya, negara ini ditentukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga bukan dari rakyat, oleh oligarki, dan untuk elite.

Pemilu merupakan wujud bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Untuk itu, dia mendorong agar Pemilu 2024 bisa berjalan damai, lancar, dan berintegritas.

“Di dalam proses pemilihan itu ada permainan-permainan politik, intrik-intrik politik, itu sah-sah saja, tapi jangan sampai menimbulkan perpecahan dan jangan sampai merusak tata kehidupan kita di dalam bernegara,” kata Mahfud dalam acara Senandung Pemilu Damai di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023.

Mahfud mengatakan, siapapun yang akan menang dalam Pemilu atau Pilpres 2024, masyarakat Indonesia harus menerima hasilnya. Jika terjadi ketidakpuasan dari masyarakat, maka ada Mahkamah Konstitusi.

“Tapi, kita ingin dan kita berharap tidak terlalu banyak perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.

Tidak hanya itu, Mahfud juga berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

“Kami berharap KPU bisa menjalankan tugasnya dengan baik, menjamin kebebasan dan kelancaran. Bawaslu mengawasi pelaksanaannya,” ujarnya.

Mahfud juga menegaskan Pemilu 2024 bukan hanya milik penyelenggara pemilu atau pemerintah, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, semua

pihak harus bekerja sama menjaga keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemilu 2024 akan menentukan masa depan demokrasi Indonesia yang lebih berintegritas, berkualitas dan bermartabat. Tidak hanya itu, untuk mewujudkan pemilu

damai, setiap individu harus peka dan sigap dalam mengatasi indikasi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu.

Mahfud mengatakan, narasi pemilu damai berbeda dengan perang politik, melainkan konsolidasi politik. Apabila narasi pemilu damai ini jarang dimunculkan di tengah-tengah masyarakat, Mahfud mengkhawatirkan ketidakstabilan dalam kondisi politik.

“Tentu narasi-narasi itu bisa dikemukakan oleh posisi kita masing-masing,” imbuhnya.

Mahfud MD menyebut Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dapat berbicara dari sudut keulamaan. Lalu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dan Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto berbicara dari sudut keamanan. Kemudian, KPU dapat membahas prosedur pemilu yang benar, sedangkan Bawaslu berbicara dari sudut pengawasannya.

“Yang lain-lain sama, mengemukakan narasi dengan posisi masing-masing, tetapi tujuannya damai, damai, damai, dan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita miliki atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa terjaga dengan baik,” ucapnya. ●



Jaga Netralitas TNI-Polri

Presiden Joko Widodo dinilai dapat menjaga netralitas TNI dan Polri di Pemilu 2024. Sehingga, dua institusi tersebut tetap loyal pada kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kelompok tertentu.

“Jokowi bisa terus menegaskan tentang netralitas TNI serta Polri, sehingga mereka tetap loyal pada kepentingan bangsa dan negara,” kata Direktur Eksekutif Senopati Syndicate, Robi Sugara, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 17 Juli 2023.

Menurut Robi, Presiden Jokowi mampu menjaga netralitas TNI dan Polri karena dia bukan petinggi partai politik atau ketua umum partai yang merupakan pihak berkepentingan dalam kontestasi pemilu.

Dengan demikian, Presiden Jokowi dapat mengarahkan TNI dan Polri untuk tetap netral dalam Pemilu 2024 dan tidak terbelah karena mendukung calon tertentu.



Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, Robi mengatakan TNI dan Polri berpotensi dimanfaatkan oleh peserta yang berkontestasi pada Pemilu 2024 untuk kepentingan memperbanyak dukungan suara.

Dia mencontohkan hal tersebut tam-

pak dari safari politik atau road show yang dilakukan sejumlah tokoh bakal calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

Robi menyebutkan salah satunya adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang memiliki latar belakang militer. Secara emosional,

Prabowo bisa memengaruhi profesionalitas TNI aktif dalam bersikap.

“Kubu Prabowo sudah melakukan road show kepada purnawirawan TNI atas kontestasinya menuju Pemilu 2024,” katanya.

Kemudian, dia mengatakan bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, juga melakukan safari politik dengan menyertakan purnawirawan TNI untuk bergabung menjadi tim sukses pemenangan dirinya.

Lalu, mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang didukung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Koalisi yang berisi Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat itu juga tampak sedang berupaya untuk menarik orang-orang dari latar belakang militer untuk masuk barisan pendukung Anies.

“Selain TNI, Polri akan berpotensi digunakan oleh mereka yang berkontestasi pada Pemilu 2024 itu,” ucap Robi. ●



ANGGARAN PILKADA 2024 MASIH BELUM JELAS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, hingga Juni 2023, baru 58 pemerintah daerah atau 11 persen yang menyepakati anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diajukan oleh KPU provinsi ataupun kabupaten/kota di tiap daerah tersebut.

Diharapkan kesepakatan anggaran itu tuntas di 546 pemda di seluruh Indonesia pada awal Desember 2023 atau sebulan sebelum tahapan Pilkada 2024 dimulai.

Anggota KPU, Yulianto Sudrajat, mengatakan, KPU provinsi dan kabupaten/kota melalui satuan kerja (satker) terkait telah berkoordinasi dengan pemda untuk membahas anggaran pelaksanaan Pilkada 2024. Sebab, usulan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan pilkada di 546 daerah mencapai Rp35,8 triliun.

Sesuai Pasal 166 Ayat (1) UU 10/2016 tentang Pilkada, pendanaan kegiatan pilkada bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, KPU berharap semua pemda segera menyepakati anggaran agar tahapan dan jadwal Pilkada 2024 tidak terganggu.

Yulianto menuturkan, 58 dari 546 pemda yang akan melaksanakan Pilkada 2024 telah menyepakati hibah pilkada melalui kesepakatan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Dari 11 persen daerah yang akan melaksanakan pilkada tersebut, total anggaran yang disepakati sebesar Rp 6,6 triliun.

Adapun 89 persen atau 488 pemda lainnya masih dalam tahap pengajuan dan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kami berharap penandatanganan NPHD bisa dilakukan paling lambat 5 Desember 2023 agar tidak mengganggu tahapan pilkada yang akan dimulai Januari 2024,” ungkap Yulianto dalam webinar bertajuk Pemantapan Koordinasi Kesiapan Anggaran Pilkada Serentak untuk Menjaga Stabilitas Politik Dalam Negeri yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Selasa, 18 Juli 2023.

Yulianto menuturkan, penyusunan pendanaan hibah pilkada tidak perlu melalui review dari KPU. Penyusunan anggaran dilakukan langsung oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota dengan pemda setempat.

Namun, penganggaran tetap harus mengacu pada standar harga kebutuhan yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Yulianto menambahkan, KPU sedang melakukan finalisasi tahapan Pilkada 2024. Dalam draf terbaru, tahapan Pilkada 2024 dimulai pada Januari 2024. Penetapan pasangan calon kepala daerah dilakukan pada 22 September 2024 dan masa kampanye dimulai pada 25 September hingga 23 November 2024. Lalu, pemungutan suara pada 27 November 2024.

“Target kami draf tahapan Pilkada 2024 bisa ditetapkan pada Agustus (2023), sehingga bisa digunakan sebagai pedoman bagi semua pihak untuk mempersiapkan seluruh tahapan lebih dini,” katanya.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengungkapkan proses pembahasan NPHD membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga, diharapkan tahun ini sudah dilakukan pembahasannya.

Dia menjelaskan panduan pelaksanaan hibah NPHD atau dasar hukumnya yakni Pasal 166 ayat (1) UU 10/2016, Permend-

agri 54/2019 Pasal 8 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) huruf b, dan ayat (3).

Bagja menegaskan dukungan pemda sangat dibutuhkan penyelenggara pemilu dalam menyelesaikan Pemilu Serentak 2024, khususnya Pilkada 2024. Dari segi SDM, Bawaslu kabupaten/kota juga masih sangat membutuhkan PNS yang dipekerjakan karena keterbatasan PNS di Bawaslu.

“Kami kira juga sangat diperlukan bantuan dari Pemda untuk menempatkan PNS di Sekretariat Panwaslu Kecamatan/Distrik,” jelasnya.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, menekankan, ketersediaan anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 harus dipastikan mencukupi. Karena itu, proses pemenuhannya perlu dievaluasi secara rutin.

“Kegiatan ini adalah bentuk respons kita terhadap masukan kawan-kawan Pemda dan penyelenggara pemilu, yang memang ada sejumlah daerah yang kadang-kadang

bertanya di kita, di Ditjen Polpum, terkait dengan penganggaran, kesiapan penganggaran Pilkada Serentak 2024,” ujarnya.

Bahtiar menjelaskan, dilibatkannya berbagai pihak dalam webinar tersebut untuk memastikan sekaligus memberi pesan kepada publik bahwa dukungan terhadap Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 telah diberikan.

Apabila ada kebutuhan anggaran yang masih belum terpenuhi, waktu yang tersisa saat ini bakal dimanfaatkan untuk terus melakukan langkah pemenuhan.

“Ini upaya untuk sinergi kita dari sejak awal mencegah hal-hal seperti ini yang nanti jangan sampai menjadi persoalan jika di daerah misalnya belum siap anggarannya,” terangnya.

Pelaksana Tugas Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Rikie, mengatakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ pada 24 Januari tentang pendanaan kegiatan Pilkada 2024.

Semua kepala daerah harus memastikan alokasi anggaran pilkada pada APBD 2023 dan APBD 2024 dalam bentuk belanja hibah. Adapun penyediaan anggaran pilkada yang bersumber dari APBD 2023 sebesar 40 persen dan sisanya 60 persen dianggarkan pada APBD 2024.

Menurutnya, pendanaan pilkada merupakan skema kegiatan yang bersifat mendesak. Jika belum menganggarkannya, pemda dapat melakukan penyesuaian penganggaran kegiatan pilkada dengan menggeser sejumlah anggaran menggunakan belanja tidak terduga, dana hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan, serta memanfaatkan kas yang tersedia. ●





“Spanduk baliho silakan. Namun, ini belum masa kampanye, tidak boleh mengajak. Pilihlah saya, itu tidak membolehkan, itu batasannya”

Tito Karnavian

PEMILU DAMAI TANPA MENJELEKKAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengharuskan seluruh elemen masyarakat menjaga keharmonisan pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan damai.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengimbau untuk tidak menjelek-jelekkan calon lain, baik saat Pemilu atau Pilkada 2024.

“Kita harus bersama-sama bertanggung jawab. Siapapun nanti yang akan bertarung, tolong menjaga keharmonisan yang ada. Mengkritik boleh, tetapi tidak boleh menjelek-jelekkan. Adu argumentasi boleh, tanpa harus saling menjatuhkan,” kata Bagja dalam acara Senandung Pemilu Damai yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023.

Bagja meyakini, siapapun yang akan menjadi calon pemimpinnya nanti merupakan putra/putri terbaik bangsa yang rela mengorbankan seluruh waktu dan kepentingannya untuk negara ataupun daerahnya.

“Oleh sebab itu, tidak boleh saling menyering,” tegasnya.

Selain itu, Bagja juga menjelaskan, saat ini peserta pemilu diperkenankan melakukan sosialisasi, hanya saja ada batasannya, yakni tidak boleh ada

ajakan. Hal itu bertujuan agar masyarakat mengetahui saat ini sudah memasuki tahapan Pemilu 2024.

“Spanduk baliho silakan. Namun, ini belum masa kampanye, tidak boleh mengajak. Pilihlah saya, itu tidak membolehkan, itu batasannya,” terangnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, juga mengingatkan semua pihak bahwa Pemilu 2024 yang damai merupakan tanggung jawab bersama.

Tito membagi tanggung jawab yang diemban lima elemen, yakni penyelenggara pemilu, peserta pemilu, media, masyarakat dan tokoh masyarakat, serta aparat keamanan.

“Ada sejumlah elemen yang simultan bergerak sama-sama bertanggung jawab menghad-

irkan Pemilu 2024 yang damai. Satu adalah penyelenggara pemilu, yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan jajaran, Bawaslu dan jajaran, termasuk pemerintah juga mendukung anggaran dan lain-lain,” ungkap Tito Karnavian.

Terkait dengan elemen kedua yaitu peserta pemilu, Tito

mengingatkan untuk menghadirkan Pemilu 2024 yang damai. Para peserta pemilu harus siap kalah ataupun menang.

Mengenai elemen ketiga, media berperan penting dalam memengaruhi publik demi menjaga pemilu yang damai. Berikutnya, mengenai elemen keempat, Tito menyampaikan partisipasi yang tinggi dalam Pemilu 2024 akan menentukan legitimasi yang kuat dari masyarakat.

“Kemudian yang berikutnya (elemen kelima) adalah aparat keamanan untuk menjaga situasi keamanan agar tetap terjaga baik. Jadi, orkestrasi semua pihak,” ujarnya.

Sementara itu, pegiat Pemilu, Titi Anggraini, menyatakan Senandung Pemilu Damai bisa diwujudkan dalam lima hal. Pertama, kerangka pemilu yang didukung. Kedua, penyelenggara pemilu berintegritas.

Ketiga, peserta pemilu kompetitif. Bukan saling membenarkan perilaku melanggar, tetapi saling mengawasi karena paling efektif adalah kontrol sesama peserta. Keempat, pemilihan berdaya. Kelima, penegakan hukum yang efektif.

“Lima hal itu akan mewujudkan senandung pemilu damai,” ujarnya. ●



Awasi Ketat Rekrutmen Badan Ad Hoc KPU

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan beberapa catatan hasil pengawasan selama rekrutmen badan ‘ad-hoc’ (sementara) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyambut Pemilu 2024.

“Beberapa catatan kami adalah pendaftar PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) memiliki rekam jejak menjadi caleg. Kemudian, terdapat juga pendaftar PPK dan PPS terdaftar sebagai tim sukses di Pemilu dan Pilkada,” ungkap Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan Badan Ad-hoc Pemilu Tahun 2024 Gelombang I, Minggu, 16 Juli 2023.

Selain itu, Herwyn juga menyampaikan bahwa terdapat pendaftar PPS yang terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU dan keterwakilan perempuan pada rekrutmen PPK yang masih di angka 27,1 persen.

Tidak hanya itu, Herwyn juga menyampaikan terdapat kasus petugas KPU tidak memperingatkan peserta tes untuk tidak membawa alat komunikasi selama tes tertulis berlangsung. Serta terjadi salah input nama saat pengumuman hasil tes tertulis.

Terdapat juga ketidakterpenuhan dua kali kebutuhan anggota PPS, perbedaan data hasil CAT dengan pengumuman hasil tes tertulis, adanya perlakuan fasilitas yang berbeda antar peserta dengan metode video call saat pelaksanaan tes wawancara PPK, dan adanya Pendaftar PPS yang terikat dalam satu perkawinan sesama penyelenggara Pemilu.

Herwyn mengakui, data hasil

pengawasan ini diperoleh melalui pengawasan melekat pada setiap tahapan pembentukan PPK, PPS, dan Patarlih. Juga melakukan pencermatan terhadap pengumuman hasil yang dikeluarkan oleh KPU.

Selain itu, jajaran Bawaslu juga berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk memperoleh data riwayat hidup pendaftar, serta membuka posko aduan masyarakat jika ditemukan adanya pelanggaran terkait pembentukan badan Ad-hoc KPU.

“Melakukan penyangkutan data peserta seleksi dengan data yang ada di SIPOL, berkolaborasi dengan pemerintah Pemilu

atau masyarakat dalam melakukan pengawasan pembentukan Badan Ad-hoc, dan menerbitkan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota terkait temuan yang kami peroleh,” ungkap Herwyn.

Ke depan, dia berharap adanya integrasi antara SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc) dengan SIPOL karena dinilai menyulitkan saat pengawasan dan pencermatan persyaratan calon.

Selain itu, Herwyn mengaku beberapa jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota mengalami kesulitan akses data SIAKBA.

“Kami berharap ke depan dalam rangka pengawasan (badan Ad hoc), maka akses kami kepada data yang ada di sistem tidak mengalami kesulitan kemudian kalau dimungkinkan. Tentu catatan hal-hal yang baik bisa kita kembangkan juga menjadi bahan evaluasi kita supaya sesama penyelenggara proses rekrutmen semakin baik,” pungkasnya. ●



“Harusnya dia mundur dari PAN, itu namanya etika politik, jangan selemaknyo dewek”

Abdul Aziz



KAMPANYEKAN GSMP JALAN MENUJU SENAYAN

Muhamad Yaser yang menjabat sebagai Anggota DPRD Sumatera Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mantap keluar dari partainya dan memilih bergabung dengan Partai Nasdem. Pada 2024 mendatang, Yaser juga sudah memilih untuk berkarir ke jenjang lebih tinggi, yakni DPR RI.

Nama Muhamad Yaser saat ini cukup mencuat setelah politisi muda ini memilih keluar dari PAN dan secara terang-terangan pindah ke Partai Nasdem Sumsel yang dipimpin mertua sekaligus Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru.

Sayangnya, meski secara terbuka meninggalkan PAN, namun suami dari Samantha Tivani ini tidak mau meninggalkan statusnya sebagai anggota DPRD Sumsel. Hal inilah yang membuat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sumsel merasa kesal pada sikap Muhamad Yaser.

DPW PAN menegaskan, meski sudah menyatakan bergabung ke Partai Nasdem, namun Yaser enggan mundur sebagai kader PAN demi tetap duduk sebagai anggota DPRD Sumsel. Padahal, yang bersangkutan akan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Nasdem pada Pemilu 2024 mendatang.

“Kami berharap Yaser itu punya etika, punya sopan santun politik sementara dia tidak pernah mengaku dari PAN. Harusnya dia mundur dari PAN, itu namanya etika politik, jangan selemaknyo dewek, mentang-mentang politisi muda. Dia harusnya menjunjung tinggi etika politik menghargai mertuanya yang ketua Nasdem. Kalau ini dia anak muda yang tidak punya etika,” kata Wakil Ketua DPW PAN Sumsel, Abdul Aziz, 11 Mei 2023.

Saat itu, Abdul Aziz mengungkapkan,

Muhamad Yaser baru akan mundur sebagai kader PAN setelah tahap Daftar Calon Tetap (DCT) dikeluarkan oleh KPU.

Namun kemelut ini akhirnya secara perlahan berakhir. DPW PAN Sumsel memastikan, proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Sumsel dari Daerah Pemilihan (Dapil) X Banyuasin, Muhamad Yaser, sudah disetujui DPP PAN.

Proses PAW dari PAN sendiri ternyata mengalami proses yang cukup panjang untuk menentukan siapa pengganti Muhamad Yaser selanjutnya.

“Seharusnya mereka yang duduk di legislatif saat ini wajib maju kembali sebagai bacaleg dari PAN dan DPP telah mengeluarkan persetujuan untuk pergantian itu,” kata Aziz.

Menurut Aziz, pengganti PAW Yaser seharusnya diberikan kepada inisial H yang meraih suara terbanyak kedua, namun

yang bersangkutan yang juga merupakan bacaleg DPRD Banyuasin telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota PAN mulai 22 Juni 2023. Sehingga statusnya untuk PAW hilang.

Terkait dengan pengunduran diri ini, Aziz secara blak-blakan mengatakan jika itu adalah keputusan pribadi.

“Boleh-boleh saja. Kita akan mempercepat proses Pengganti Antar Waktu (PAW) lebih cepat. Itu adalah pilihan yang sudah dia ambil, dan sejauh ini proses PAW sedang berjalan,” terangnya.

Aziz menambahkan, untuk proses PAW ini sudah ada persetujuan dari DPP PAN dan tinggal proses administrasi di DPRD Sumsel.

Sementara, Muhamad Yaser sendiri seperti lebih fokus pada sosialisasi pencalonannya sebagai Anggota DPR dari Partai Nasdem untuk Pemilu 2024 men-

datang. Berbagai tempat tersebar poster-poster politisi muda kelahiran 3 Maret 1987 itu yang bertuliskan Road to DPR RI.

Muhamad Yaser juga cukup rajin mendampingi Herman Deru saat melakukan kunjungan kerja di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) I, yakni Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Kota Lubuklinggau, serta Kota Palembang.

Sosok Muhammad Yaser mulai dikenal masyarakat saat menikahi Samantha Tivani, putri Gubernur Herman Deru yang juga berencana mencalonkan diri sebagai Anggota DPR dari Partai Nasdem Dapil II.

Rupanya alumni S1 Universitas Sriwijaya ini dikenal cukup aktif di berbagai kegiatan organisasi kepemudaan. Bahkan, sempat menjadi pengurus OSIS di SMA PGRI 1 Betung Banyuasin. Yaser juga sempat menjadi Wakil Ketua KNPI Palembang serta menduduki kursi Wakil Ketua KNPI Sumsel.

Jalan Muhamad Yaser untuk menuju kursi di Senayan tentu tidak mudah. Selain harus bersaing dengan para incumbent, dia juga berkompetisi dengan para pendatang baru lainnya.

Beberapa pendatang baru yang punya peluang besar itu antara lain Anita Noer-inghati kader Partai Golkar yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Sumsel. Kemudian, Kartika Sandra Desi dari Partai Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumsel.

Selain itu, Muhamad Yaser juga harus bersaing dengan Fauzi Amro, anggota DPR dari Partai Nasdem, serta beberapa politisi senior lainnya.

Untuk mencapai tujuannya, kini Muhamad Yaser fokus pada kegiatan kampanye Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) ke masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

GSMP sendiri merupakan program yang inisiasi dari Gubernur Herman Deru dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di Sumatera Selatan. Melalui sosialisasi GSMP inilah, Muhammad Yaser mengenalkan dirinya ke masyarakat. ●





“Banyak bunga-bunga yang disampaikan oleh Pemerintah. Memuji diri sendiri. Itu saya kira bagus untuk meningkatkan kepercayaan diri”

Mustafa Kamal

PENGHUNI ABADI SENAYAN DARI SUMATERA SELATAN

Perwakilan Sumatera Selatan di DPR RI setiap waktu silih berganti. Persaingan politik di legislatif yang begitu ketat membuat setiap orang tidak ada jaminan bisa menjabat kembali dalam lima tahun ke depan.

Sehingga, jangan heran mereka yang selama ini dikenal karena sering tampil dalam berbagai kegiatan dan agenda politik, tiba-tiba menghilang karena gagal terpilih lagi di arena pemilihan legislatif.

Di sisi lain, jabatan sebagai anggota DPR RI adalah suatu hal yang sangat membanggakan karena bisa dikatakan menjadi posisi tertinggi seorang politisi. Sehingga mereka yang berada di posisi ini merupakan orang-orang hebat dan lebih istimewa jika bisa mempertahankannya.

Untuk mempertahankan posisi inilah yang paling sulit karena tidak semua politisi mampu melakukannya karena tingginya biaya politik yang harus mereka keluarkan. Kebanyakan dari anggota DPR RI hanya mampu

bertahan hingga dua periode, dan pada masa ketiga jabatannya biasanya mereka sering gagal.

Namun, berbeda dengan dua politisi senior asal Sumatera Selatan yang layak disebut sebagai penghuni abadi kursi Senayan.

Keduanya adalah anggota DPR RI dari Partai Golkar, Kahar Muzakir, yang sudah menjabat selama empat periode. Kahar Muzakir menjabat anggota DPR RI pada 2004–2009, 2009–2014, 2014–2019, dan 2019–2024. Saat ini, Kahar Muzakir menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR.

Pria kelahiran 10 Desember 1946 akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. Kahar Muzakir adalah seorang sarjana muda Pendidikan Teknik Mesin IKIP Yogyakarta. Kemudian, dia melanjutkan pendidikannya dengan mengambil Sarjana Pendidikan Teknik Mesin IKIP Yogyakarta pada 1970.

Karier politiknya dimulai ketika dia bergabung HMI Cabang Yogyakarta (1967–1974). Kemudian, dia berga-

bung di DPD AMPI Sumsel (1984–1989). Dia juga pernah menjabat sebagai wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumsel.

Kemudian, Kahar Muzakir terpilih menjadi anggota Komisi X DPR untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan II yang menangani masalah Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Kebudayaan.

Pada November 2015, menjelang sidang kasus etik pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR terkait perpanjangan kontrak kerja PT Freeport Indonesia, Kahar ditunjuk oleh Fraksi Golkar untuk menjadi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Pada Januari 2016, Kahar Muzakir ditunjuk sebagai Ketua Badan Anggaran DPR. Kahar menempati kursi anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan sejak 29 Mei 2017.

Sebagai politisi senior di Partai Golkar, pengaruh Kahar Muzakir cukup besar. Hal ini terlihat saat ia menjabat sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar 2023 yang

Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Selain Kahar Muzakir, sosok Mustafa Kamal juga sangat lekat dengan masyarakat Sumatera Selatan.

Mustafa Kamal sudah tiga kali menjabat sebagai anggota DPR dari wilayah Sumatera Selatan yakni sejak periode 2009–2014, 2014–2019, dan 2019–2024. Mustafa Kamal adalah salah satu anggota DPR Fraksi PKS melalui daerah pemilihan Sumatera Selatan I yang meliputi Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Kota Palembang, dan Kota Lubuklinggau.

Pria kelahiran 14 Desember 1969 menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009–2014 dan sempat menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS. Pada periode 2014–2019, ia bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan. Pada 6 April 2016, dia ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal PKS menggantikan Taufik Ridho.

Semasa studi di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Mustafa telah terlihat bakat kepemimpinannya. Pada 1993–1994, dia



berjalan sukses dan lancar.

“Alhamdulillah, Rakernas Partai Golkar berjalan sukses, semuanya aman dan lancar. DPD Golkar yang hadir juga solid bahkan mereka semakin membulatkan tekad untuk mengawal apa yang telah diputuskan oleh Golkar pada forum Rakernas ini,” kata Kahar dalam keterangan tertulisnya.

Ia menjelaskan Rakernas Partai Golkar 2023 menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diberi mandat penuh untuk menentukan capres, cawapres, dan koalisi yang akan dipilih Partai Golkar untuk Pilpres 2024.

Kesuksesan Kahar Muzakir kini diikuti anaknya Wahyu Sanjaya yang sudah menjadi Anggota DPR periode 2014–2019 dan 2019–2024. Hebatnya, Wahyu bukan berasal dari Partai Golkar, tetapi memilih menjadi kader Partai Demokrat dan saat ini duduk di Komisi VI.

Politisi selanjutnya adalah Mustafa Kamal dari

terpilih menjadi Ketua Senat Fakultas Sastra UI. Kemudian pada 1998, Mustafa juga bagian dari deklarator Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Selain menjadi Anggota DPR, dia juga menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi.

Sebagai seorang politisi, Mustafa Kamal cukup kritis menyikapi berbagai kebijakan pemerintah. Anggota Komisi X DPR itu sempat menyebut pemerintah hanya memaparkan data-data baik yang dipunya saja, tanpa menyajikan data dan fakta lain sebagai penyeimbang.

“Banyak bunga-bunga yang disampaikan oleh pemerintah. Memuji diri sendiri. Itu saya kira bagus untuk meningkatkan kepercayaan diri. Namun, semua itu juga harus disertai dengan angka-angka yang lebih objektif dan berimbang. Percaya diri itu perlu, tetapi harus hati-hati juga penting,” ujar Mustafa.

Pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024, Mustafa Kamal bakal kembali mencalonkan diri di kursi DPR RI. Dia menjadi satu-satunya kader PKS yang mampu menembus kursi Senayan hingga saat ini. ●

“Saya akan nyaleg DPR RI dan pak Malino istirahat, insyaallah di kedua dapil tersebut sudah ada penggantinya yang mumpuni”

Kartika Sandra Desi



ADU KUAT SRIKANDI SUMSEL

Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati dan Wakil Ketua Kartika Sandra Desi secara resmi mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Masuknya dua nama ini menambah ketatnya persaingan para Srikandi asal Sumatera Selatan menuju kursi Senayan yang sebelumnya sudah ditempati para petahana atau incumbent.

Selain kedua nama itu, ada juga Siska Marleni yang merupakan mantan anggota DPD RI periode 2014-2019. Dia Kembali

(PDIP), Siti Nurizka Putri (Gerindra), Irma Suryani dan Sri Kustinah (Partai Nasdem).

Berdasarkan data, Dapil I Sumatera Selatan yang meliputi Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Kota Lubuklinggau dengan terdapat delapan kursi.

Pada pemilu 2019, satu Srikandi berhasil menuju Senayan yakni Riezky Aprilia. Kemudian bertambah melalui proses PAW dari Partai Gerindra, yakni dari Eddy Prabowo ke Reni Astuti dan Siti Nurizka.

Sementara itu, untuk Dapil II Sumatera Selatan yang meliputi Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Kota Prabumulih, Kabupaten PALI, Muara Enim, OKU Timur, OKU Induk, OKU Selatan, Lahat, Empat Lawang dan Kota Pagaram terdapat sembilan kursi.

Dari sembilan kursi tersebut, tiga di antaranya diwakili oleh para Srikandi yakni

nanti ada delapan petahana DPRD Sumsel dari Partai Gerindra yang kembali maju Pileg DPRD provinsi.

Sementara dia sendiri nyaleg DPR RI, sedangkan Malino yang berasal dari Dapil Banyuasin tidak mencalonkan diri karena faktor kesehatan.

“Saya akan nyaleg DPR RI dan pak Malino istirahat. Insyaallah di kedua dapil tersebut sudah ada penggantinya yang mumpuni,” kata wanita yang akrab disapa Cici itu.

Sebagai Wakil Ketua DPRD Sumsel, saat ini kiprah Cici cukup baik dan dikenal dekat dengan masyarakat para konstituennya.

Sementara, Ketua DPRD Sumatera Selatan, Anita Noeringhati, menyatakan siap untuk naik kelas melangkah ke Senayan pada Pileg 2024. Menurut Anita, dirinya diminta untuk mencalonkan diri ke DPR RI dapil Sumsel I karena secara profesi dan secara jabatan sudah menduduki jabatan paling tinggi di tingkat provinsi.

“Sehingga saya diperintah partai untuk melanjutkan ke DPR RI. Saya sebagai kader siap. Masalah yang hadir itu memang orang-orang hebat harapan saya memang nanti anggota DPR RI. DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten Kota itu adalah diisi orang-orang yang memiliki kapabilitas dan kapasitas, sehingga peran dari wakil rakyat itu bisa dirasakan oleh masyarakat,”

tama di Kota Palembang. Wanita yang sebelumnya dikenal sebagai pengacara ini juga rajin turun ke lapangan serta aktif di berbagai kegiatan yang ada di masyarakat.

Selain Anita Noeringhati dan Kartika Sandra Desi, putri Herman Deru yakni Samantha Tivani rencananya akan maju dari Dapil II lewat Partai Nasdem. Samantha Tivani saat ini cukup intensif turun ke lapangan mendampingi kegiatan ayahnya ke daerah-daerah, seperti OKU Timur, OKU, OKU, Muara Enim, Lahat dan lainnya.

Sebagai seorang putri kepala daerah, peluang Samantha untuk melenggang ke Senayan juga cukup besar karena sosialisasi yang dilakukannya cukup masif.

Namun, para Srikandi incumbent juga tetap punya peluang yang sama. Seperti Sri Kustinah yang tak lain istri Bupati PALI, Heri Amalindo. Ia menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem Dapil II.

Dari Dapil I, ada Riezky Aprilia yang merupakan eks kontestan Pilwako Lubuklinggau 2018 yang juga putri kandung eks Wali Kota Lubuklinggau dua periode, Riduan Efendi.

Sebagai incumbent, Riezky Aprilia akan mendapat persaingan ketat dari Anita Noeringhati dan Kartika Sandra Desi.

Bersaing Ketat

Terkait persaingan para Srikandi Sum-



mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem.

Masuknya Anita Noeringhati dan Kartika Sandra Desi secara tidak langsung akan mengubah peta politik di Sumsel sekaligus persaingan gender yang kuat.

Kehadiran mereka juga akan cukup mengancam para politisi senior Sumsel seperti Kahar Muzakir (Golkar) yang terbilang ‘abadi’ di kursi Senayan. Ada pula politisi senior Partai Demokrat Ishak Mekki, Mustafa Kamal dari PKS dan beberapa nama lainnya.

Mereka juga akan bersaing dengan para Srikandi Sumsel yang saat ini sedang menjabat di DPR RI di antaranya Riezky Aprilia

Irma Suryani (PAW dari alm Pearcha HD/ Nasdem), Sri Kustina (Nasdem), dan Hanna Gayatri (PAN).

Srikandi pendatang baru itu, selain akan bersaing dengan Srikandi petahana, juga akan bersaing dengan para tokoh politik pria yang tidak kalah mumpuni.

Selain dengan politisi senior yang basis massanya sudah mengakar, para Srikandi ini juga akan bersaing para mantan kepala daerah yang akan habis masa jabatan dan diprediksi ikut ambil bagian di Pemilu 2024.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumsel Kartika Sandra Desi menyatakan pada Pileg 2024, dia mendapat tugas untuk menjadi caleg DPR RI. Sehingga pada pada Pileg

kata politisi Partai Golkar ini.

Alasan lain untuk maju mengikuti sebagai caleg DPR RI karena menginginkan agar bisa berbuat hal yang lebih besar lagi bagi Sumsel.

“Yang pasti, jabatan politik di DPRD Provinsi sudah mencapai puncak selaku ketua DPRD, dan ingin berbuat banyak untuk Sumsel. Karena saya melihat dengan menjadi anggota DPR RI akan lebih banyak kewenangannya dan bisa dibawa ke Sumsel,” katanya.

Dalam memperebutkan kursi DPR RI, Anita akan mendapatkan persaingan yang ketat mengingat yang akan maju nantinya terdapat beberapa ketua partai dan kepala daerah.

“Persaingan akan ketat dan saya tahu di 2024 itu adalah tahun politik yang paling tajam selama ini, karena semua elemen akan turun. Tapi saya yakin dan percaya, apa yang sudah kita perbuat, masyarakat tidak akan salah memilih,” jelasnya.

Peluang Anita Noeringhati menuju kursi DPR RI cukup besar karena dia dikenal memiliki loyalis yang cukup besar, teru-

sel di DPR RI, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI), Arianto, menilai, hasil survei yang dilakukan ada peningkatan elektabilitas dari caleg perempuan di Sumatera Selatan. Hal ini juga memicu terjadinya persaingan di antara kandidat perempuan.

Masuknya para pendatang baru di Pileg 2024 dari kalangan perempuan merupakan hal yang positif. Sehingga persaingan dapat ditentukan seberapa besar elektabilitas dari para kandidat.

Dia melihat banyaknya caleg perempuan di tingkat DPR RI juga menandakan kalau peran wanita di dunia politik sudah sangat baik. Hal ini juga bisa dilihat dari anggota DPD RI asal Sumatera Selatan yang sebagian besar didominasi perempuan.

Arianto juga menilai persaingan memperebutkan kursi Senayan di Pileg 2024 akan cukup ketat, sehingga para kandidat harus mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Para incumbent tetap punya peluang, namun tidak besar karena para mereka juga punya kapabilitas dan elektabilitas yang mumpuni. ●





“Bisa saja 50
persen incumbent
DPR RI periode
mendatang ber-
potensi diisi wa-
jah wajah baru”

Arianto

INFO
DAPIL

Minggu III • Juli 2023

15

DIKUASAI PENDATANG BARU

Persaingan menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Selatan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 diprediksi akan berlangsung ketat. Sebab, kini muncul nama-nama baru bakal caleg yang akan menjadi ancaman baru anggota DPR RI yang sekarang menjabat atau incumbent.

Selain itu, ada pula nama putra Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, yakni AW Noviadi Mawardi, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra Sumsel. Basis suara utama Ovi berasal dari Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten OKI.

Selanjutnya, ada nama SN Prana Putra Sohe yang kini menjabat sebagai Wali Kota Lubuklinggau. Prana mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari PKB dengan basis suara utama dari Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas.

Kemudian ada Ketua DPRD Sumsel, Anita Noering-

latan meliputi Kabupaten OganIlir, Ogan Komering Ilir, Kota Prabumulih, Kabupaten PALI, Muara Enim, OKU Timur, OKU Selatan, Lahat, Empat Lawang dan Kota Pagaralam dengan Sembilan kursi yang diper-

ebutkan. Anggota DPR RI asal Dapi II Sumsel periode 2019-2024 saat ini adalah Bertu Merlas (PKB), Sri Meliyana (Gerindra), Yulian Gunhar (PDIP), Bobby Adhityo Rizaldi (Golkar), Irma Suryani (Nasdem), Hanna Gayatri (PAN), dan Wahyu Sanjaya (Partai Demokrat).

Menurut Arianto, meski peluang pendatang baru cukup besar, namun para incumbent juga punya basis



Para incumbent yang minim prestasi di daerah pemilihan (Dapil) mereka selama menjabat berpotensi besar tidak duduk kembali di Senayan. Apalagi, pola memilih masyarakat sekarang ini sudah mulai beralih dari pemilih irasional menuju pemilih rasional.

“Temuan survei menunjukkan adanya arus yang besar pola memilih masyarakat sudah menuju fakta yang telah dibuat oleh anggota legislatif sekarang ini, bukan lagi janji-janji atau slogan yang terpampang di spanduk, baliho, stiker dan lain sebagainya itu. Ini khusus catatan bagi incumbent DPR RI,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI), Arianto.

Menurutnya, caleg yang minim prestasi jangan harap akan Kembali dipilih oleh masyarakat, meskipun terpampang besar banyak slogan, misalnya Siap Melanjutkan Kembali, Menuju Ke Senayan Kembali dan lainnya.

Prestasi harus bisa dilihat dan dirasakan masyarakat ketika mereka duduk di DPR RI, bukan hanya delapan bulan baru turun menyapa pemilih lagi.

Mantan peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini sangat yakin caleg yang baru akan bertarung pada Pileg 2024 akan banyak masuk menggeser para incumbent.

Harapan dari calon DPR RI yang baru justru lebih besar sentimennya ketimbang incumbent DPR RI yang tidak pernah terekspose berprestasi dalam menyalurkan aspirasi pemilih di dapilnya masing-masing. Peluang ini merupakan ruang besar yang bisa dimanfaatkan penantang incumbent. Sebab, secara sentimen politik tentu tingkat ketidaksukaan dari pemilih kepada incumbent DPR RI cukup tinggi.

Di Sumatera Selatan, peluang para pendatang baru untuk menggusur para seniornya cukup besar. Ada beberapa hal pendukung yang membuat peluang mereka ini sangat besar.

Sebut saja Samantha Tivani, Ratu Tenny Leriva, dan Muhammad Yaser yang merupakan putri dan menantu dari Gubernur Sumsel, Herman Deru.

Samantha Tivani yang masuk Dapil II Sumsel kini banyak melakukan kegiatan di wilayah OKU Timur. Wilayah itu kini dijabat Bupati Lanosin yang tak lain adalah paman dari Samantha Tivani.

hati, dari Partai Golkar yang maju dari Dapil I dengan basis suara utama dari Kota Palembang.

Wakil Ketua DPRD Sumsel dari Partai Gerindra, Kartika Sandra Desi, juga bakal maju di Pileg 2024 mengincar kursi DPR RI dengan basis suara utama dari Palembang dan Kabupaten Banyuasin.

“Kemudian ada nama lain seperti Giri Ramanda NK, Susno Duadji. Mereka ini juga sangat berpotensi menggeser incumbent DPR RI. Bisa saja 50 persen incumbent DPR RI periode mendatang berpotensi diisi wajah wajah baru,” ungkap Arianto.

Melihat minimnya ekspose capaian prestasi, baik di media sosial maupun media cetak dan elektronik yang dilakukan incumbent DPR RI, dia mengatakan ada potensi pandangan pemilih akan negatif ke depannya.

Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi incumbent DPR RI jika dalam benak pemilih sudah beranggapan demikian.

Pada Pileg 2024, Sumatera Selatan dibagi dalam dua Dapil. Dapil I meliputi Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Kota Lubuklinggau dengan 8 kursi yang diperebutkan.

Adapun anggota DPR RI asal Dapil I Sumsel periode 2019-2024 saat ini diisi Siti Nurizka Puteri Jaya (Gerindra), Eddy Santana Putra (Gerindra), Riezky Aprilia (PDIP), Kahar Muzakir (Golkar), Fauzi Amro (Nasdem), Mustafa Kamal (PKS), Achmad Hafisz Tohir (PAN), dan Ishak Mekki (Partai Demokrat).

Sementara untuk Dapil II Sumatera Se-

suara yang cukup kuat. Seperti Kahar Muzakir yang dikenal punya massa yang setia sepanjang masa. Untuk itulah dia juga dikenal sebagai penghuni kursi DPR RI abadi di Senayan.

Kemudian ada juga Mustafa Kamal yang sudah dua periode ini bercokol di Senayan karena memiliki massa setia dari kader partainya.



“Trennya terjadi penguatan dukungan kepada Prabowo cara konsisten Januari 2023”

Djayadi Hanan



Survei LSI Juli 2023

PRABOWO-GANJAR KETAT ANIES MASIH MELOROT

Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan masih menjadi tiga kandidat bakal calon presiden untuk Pilpres 2024 dengan elektabilitas tertinggi dari nama lainnya.

Berdasarkan hasil survey terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan awal Juli 2023, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menduduki peringkat pertama dalam simulasi 19 dan tiga nama kandidat capres untuk Pilpres 2024.

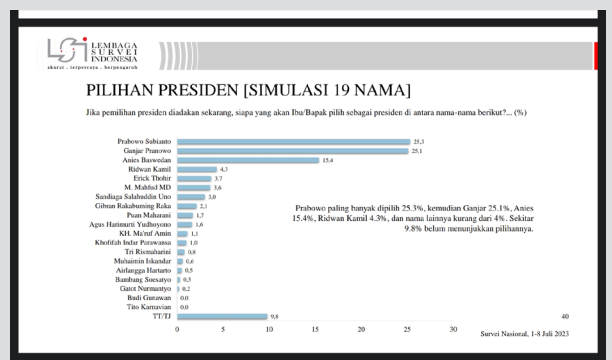
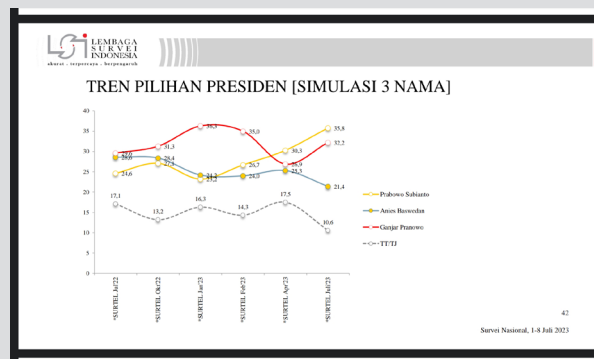
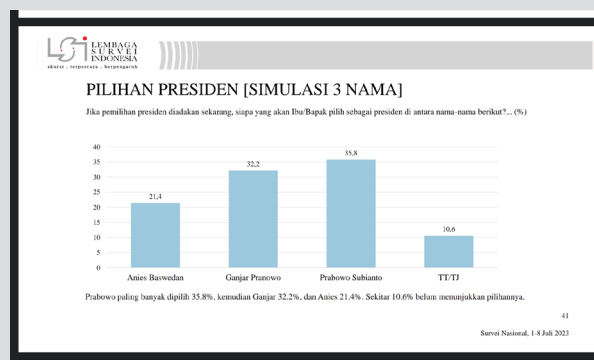
Dalam simulasi 19 nama capres, Prabowo mendapat 25,3 persen suara dari 1.242 responden yang dipilih secara acak. Posisi kedua ditempati Ganjar yang kalah tipis dari Prabowo dengan 25,1 persen. Sedangkan, capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mendapat 15,4 persen. Sisanya ada nama Ridwan Kamil, Erick Thohir, Mahfud MD yang mendapat suara di bawah 10 persen dari responden.

Pada simulasi tiga nama, Prabowo juga masih unggul dengan perolehan 35,8 persen. Ganjar juga masih berada di posisi kedua dengan memperoleh 32,2 persen dan Anies 21,4 persen. Sisanya, sekitar 10,6 persen responden belum menunjukkan pilihannya.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, mengungkapkan hasil survei LSI pada Januari 2023 menunjukkan Prabowo memperoleh elektabilitas 23,2 persen. Lalu, pada Februari 2023, elektabilitas ketua umum Partai Gerindra itu meningkat menjadi 26,7 persen. Kemudian, pada April 2023, elektabilitas Prabowo menjadi 30,3 persen.

Djayadi menilai tingginya elektabilitas Prabowo tidak terlepas dari aktivitasnya mendampingi

Presiden Jokowi di berbagai acara. Menurutnya, publik melihat kehadiran Prabowo disamping Presiden Jokowi sebagai sinyal ajakan untuk mendukung Menteri Pertahanan itu. Di satu sisi, Pres-



Dalam simulasi 24 nama tersebut, beberapa tokoh lainnya yang meraih elektabilitas di bawah Erick, di antaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (13,5 persen), Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (9,9 persen), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (9,5 persen), serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (8,9 persen).

“Ini yang menarik pada Juli ini, biasanya Erick Thohir tidak nomor satu kan, sekarang, Erick Thohir dalam survei LSI untuk pertama kalinya menduduki posisi pertama,” ujar Djayadi.

Djayadi menambahkan, Erick Thohir juga meraih elektabilitas tertinggi sebagai bakal cawapres dalam simulasi dua belas nama dan tujuh nama. Di simulasi dua belas nama, Erick unggul dengan elektabilitas sebesar 18,5 persen mengalahkan beberapa tokoh, seperti Ridwan Kamil (16,6 persen), Sandiaga Uno (11 persen), dan Agus Harimurti Yudhoyono (10 persen).

Sementara, dalam simulasi tujuh nama, Erick Thohir unggul dengan elektabilitas sebesar 21,2 persen mengalahkan Ridwan Kamil (19,6 persen) dan Sandiaga Uno (17,5 persen).

Masih dalam hasil survey LSI Juli 2023, PDIP masih menjadi partai politik dengan elektabilitas terkuat dan jauh melampaui partai lainnya. Partai yang dipimpin Megawati ini dipilih oleh 21,9 persen responden. Kemudian, keterpilihannya naik menjadi 23,7 persen.

“Yang lain bersaing ketat itu PKS, Golkar, PKB, Nasdem, Demokrat, dan Perindo. Menariknya itu di angka yang cenderung ketat persaingannya,” kata Djayadi.

Elektabilitas Partai Demokrat tercatat melemah dari 7,1 persen pada Januari 2023 menjadi 4,4 persen pada Juli 2023. Melemahnya elektabilitas Partai Demokrat diiringi dengan penguatan elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pada Januari 2023, PKS dipilih oleh 5 persen responden, kemudian naik menjadi 6,2 persen pada Juli 2023. Alhasil, PKS pun melesat ke peringkat ketiga pada awal bulan ini.

Jika mengacu pada ambang batas parlemen Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 yang elektabilitasnya minimal 4 persen, pada Juli 2023 ada 10 partai politik yang tidak lolos batas tersebut. Namun, pada Juli 2023 masih ada 21,9 persen responden yang belum menentukan pilihannya.

Adapun survei LSI digelar pada 1-8 Juli 2023 dengan sampel sebanyak 1.242 responden yang dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak atau metode random digit dialing (RDD).

Survei dilakukan melalui wawancara telepon dengan responden yang dilakukan pewawancara terlatih. Margin of error diperkirakan kurang lebih 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling. ●

